

ANALISIS PENYALAHGUNAAN DANA ANGGARAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT : STUDI KASUS ADE YASIN

Amalia Pratiwi¹, Ananda Dewi², Silvana Putri Priageng³, Muhammad Sulthan Fatih⁴, Ridwan⁵

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UPN Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

2310413002@mahasiswa.upn

[vj.ac.id](mailto:2310413009@mahasiswa.upn)¹,

2310413009@mahasiswa.upn

[vj.ac.id](mailto:2310413029@mahasiswa.upn)²,

2310413029@mahasiswa.upn

[vj.ac.id](mailto:2310413084@mahasiswa.upn)³,

2310413084@mahasiswa.upn

[vj.ac.id](mailto:2310413084@mahasiswa.upn)⁴,

ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁵



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *This study aims to analyze the impact of budget fund misuse by former Bogor Regent Ade Yasin on public trust and participation in local government oversight. This case reflects the weakness of public oversight and accountability systems at the local level. The study employs a qualitative approach using document analysis, examining secondary sources such as news articles, journals, and official reports. The findings reveal that corrupt practices carried out through the manipulation of local financial audit opinions directly impact the decline in public trust toward the government and public participation in oversight forums such as the Musrenbang. The public feels they lack effective control over public policies due to the dominance of political elites. This study emphasizes the importance of reforming the oversight system, enhancing budget transparency, and strengthening public literacy as efforts to rebuild public trust and engagement in clean and participatory governance.*

Keywords: *Public Participation, Local Budgeting, Corruption, Ade Yasin*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan dana anggaran oleh mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas publik di tingkat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, mengkaji sumber-sumber sekunder seperti berita, jurnal, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi yang dilakukan melalui manipulasi opini audit keuangan daerah berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta partisipasi publik dalam forum pengawasan seperti Musrenbang. Masyarakat merasa tidak memiliki ruang kontrol yang efektif terhadap kebijakan publik akibat dominasi kekuasaan elit politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan, peningkatan transparansi anggaran, dan penguatan literasi publik sebagai upaya membangun kembali kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Anggaran Daerah, Korupsi, Ade Yasin

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dana anggaran publik merupakan isu serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, menjadi contoh konkret bagaimana praktik korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam kasus tersebut, Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kabupaten Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Praktik manipulatif seperti ini tidak hanya menunjukkan lemahnya integritas pejabat publik, tetapi juga berdampak langsung pada semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem telah dikendalikan oleh elit yang korup, mereka cenderung menjadi apatis dan menarik diri dari proses-proses demokratis seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau forum-forum partisipatif lainnya.

Fenomena ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah masih sering bersifat simbolik. Secara normatif, banyak regulasi yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, namun prakteknya masih jauh dari ideal. Hidayat (2015) menyatakan bahwa mekanisme partisipasi publik dalam sistem penganggaran daerah sering kali bersifat formalitas dan manipulatif, sehingga partisipasi masyarakat tidak berdampak signifikan terhadap arah kebijakan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat demokrasi partisipatif dan praktik politik lokal yang kerap tertutup dan transaksional (Hidayat, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan pengawasan anggaran publik. Arifin (2018), misalnya, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat serta transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Ramadhan, Wiralestari, dan Zamzami (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara pengetahuan anggaran anggota dewan dan pengawasan keuangan daerah. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti tingkat literasi anggaran, keterbukaan informasi publik, dan dinamika politik lokal.

Sayangnya, sebagian besar studi terdahulu masih bersifat kuantitatif dan generalistik, sehingga belum menggambarkan secara kontekstual bagaimana dinamika penyalahgunaan anggaran mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Padahal pendekatan kualitatif dengan studi kasus, seperti kasus Ade Yasin, sangat dibutuhkan untuk menggambarkan realitas lokal secara mendalam, termasuk relasi kuasa dan kepentingan politik yang berperan dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kualitatif bagaimana penyalahgunaan anggaran berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran di Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur ilmu politik,

terutama terkait isu korupsi, transparansi, dan demokrasi partisipatif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih substansial dalam pengawasan anggaran, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel (Arifin, 2018).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penyalahgunaan dana anggaran dalam kasus Ade Yasin mempengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah?

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Ade Yasin dan ditujukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat melalui adanya permasalahan penyalahgunaan anggaran dana tersebut

TELAAH LITERATUR

1. Teori Yang Digunakan

1) Teori Good Governance

Good Governance merupakan salah satu acuan utama negara di dunia khususnya negara berkembang dalam upaya memperbaiki pemerintahan yang ada menjadi lebih baik lagi. Good Governance dipandang sebagai salah satu proses menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil didasarkan pada profesionalisme kinerja aparat guna memenuhi kepentingan publik (Wijayanto, 2015). Dikutip dari Rahimallah (2022) prinsip good governance menurut World Bank sebagai lembaga pendukung bantuan negara dalam hal investasi/pinjaman, good governance harus memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas, prediktabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi. United Nation Development Programme (UNDP) juga mengungkapkan good governance memiliki beberapa prinsip seperti visionary, openness and transparency, participation, accountability, rule of law, democracy, professionalism and competency, responsiveness, efficient and effectiveness, decentralization, private sector and civil society partnership, commitment to reduce inequality, commitment to environmental protection, dan commitment to fair market. Dalam kasus Ade Yasin yang pernah menjabat sebagai Bupati Bogor teori ini melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam merespon kasus korupsi, transparansi dana, dan supremasi hukum dalam menjatuhkan hukuman untuk Ade Yasin.

2. Konsep-Konsep Yang digunakan

1) Dana Anggaran

Pengelolaan uang yang baik dibutuhkan perencanaan, perencanaan dalam keuangan bisa disebut sebuah anggaran yang pada dasarnya merupakan cara sistematis dan formal manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun (Kuntadi dan Dian, 2022). Penganggaran dana dalam ranah publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis demi mendapatkan efek yang maksimal dan tidak membuat gagal

anggaran dana yang sudah disusun. Pengalokasian anggaran dana yang efisien dapat mengatasi masalah sumber dana yang terbatas sehingga memprioritaskan kegiatan anggaran pada kebijakan atau kegiatan yang efektif dan efisien.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif publik terhadap program yang diadakan pemerintah yang ditujukan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Putri et al, 2021). Partisipasi merupakan sebuah hak bagi masyarakat terutama di Indonesia sebagai negara demokrasi untuk terjun langsung karena masyarakat sendirilah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi Dalam mengupayakan anggaran yang efektif dan efisien maka masyarakat perlu peran aktif dalam mengawasi dan mengkritisi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran dana. Terdapat Partisipasi masyarakat sendiri dipengaruhi oleh faktor internal yaitu karakter individu itu sendiri dan faktor eksternal seperti tokoh masyarakat dimana mereka memiliki pengaruh terhadap program tersebut. Kesempatan juga berpengaruh atas partisipasi yang masyarakat bisa berikan, menurut Andriani (2017) partisipasi masyarakat tidak nampak karena mereka tidak diberi kesempatan atau dibenarkan berpartisipasi.

3. Review Literatur

Penelitian Risnaningsih, Ahmad Mukoffi, dan Filaria Hendrani (2022) dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang”** menemukan bahwa praktik korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dipicu oleh adanya pengelolaan dana desa yang tidak baik dan maksimal. Pengelolaan dana anggaran yang tidak baik meliputi adanya pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel terhadap anggaran dana desa. Hal tersebut tentunya mendorong celah untuk terjadinya praktik-praktik korupsi yang bersumber dari dana anggaran. Tindakan korupsi di pemerintah sering didorong adanya faktor kepentingan pribadi dan hal ini tentunya merugikan masyarakat.

Penelitian Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi (2023) dengan judul penelitian **“Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi”** menemukan bahwa korupsi dari dana desa yang dilakukan oleh pejabat didorong oleh adanya faktor kepentingan individu. Adanya korupsi pejabat yang didorong faktor individu tentunya tidak luput dari pengelolaan dana anggaran desa yang tidak baik sehingga menjadi celah pejabat untuk melakukan praktik-praktik korupsi dari dana anggaran desa.

Penelitian Khairil Akbar, dkk (2021) dengan judul penelitian yaitu **“Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi”** menemukan bahwa dana anggaran seringkali menjadi sumber utama dari adanya praktik korupsi di pemerintah daerah. Terjadi korupsi dana anggaran daerah disebabkan adanya kekurangan dalam pengelolaan dana daerah, salah satunya adalah minimnya pengawasan dana anggaran. Kurangnya pengawasan dana anggaran suatu daerah seringkali menjadi penyebab utama dari adanya praktik korupsi di pemerintah tingkat daerah.

Penelitian dari Muhammad Maulana (2023) dengan judul **“Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa”** menemukan bahwa banyaknya kasus korupsi di pemerintahan daerah terjadi akibat kurangnya keseimbangan dalam pengelolaan dana anggaran yang bersumber dari APBN negara. Ketidakseimbangan menjadi pemicu praktik korupsi di pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan pengelolaan dana daerah yang tidak diseimbangi oleh nilai-nilai transparan dan juga akuntabel. Oleh karena itu tindakan korupsi di pemerintah daerah seringkali melibatkan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dengan niat untuk kepentingan pribadi.

Penelitian Indra Gunawan dan Yohanes Bahari (2024) dengan judul **“Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)”** menemukan bahwa terjadinya korupsi dari pengelolaan dana desa disebabkan adanya ketidakseimbangan dari sistem sosial. Adanya ketidakseimbangan sosial menjadi pemicu terjadinya korupsi yang berakar dari pengelolaan dana desa, selain itu korupsi dari pengelolaan dana desa juga didorong oleh beberapa faktor pemicu seperti sistem birokrasi yang rumit, minimnya transparansi pengelolaan dana, kurangnya pengawasan pengelolaan dana, dan juga didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang rendah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan yang menggunakan proses berpikir induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. studi dokumen yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan beberapa kajian yang ditelaah. Sumber utama dalam studi dokumen yaitu buku, dilanjutkan dengan artikel atau jurnal, dan terakhir adalah situs-situs yang ada di internet. Dokumen yang sudah diperoleh kemudian akan dianalisis yang membentuk kajian yang sistematis, terpadu, dan rinci.

Analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, dan makna penting dari cerita informan. Menurut Miles dan Huberman (1994), tahapan analisis ini dimulai dengan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kepemimpinan Ade Yasin Sebagai Bupati Bogor

Ade Munawaroh Yasin atau yang dikenal sebagai Ade Yasin merupakan sosok figur politik yang pernah menjabat sebagai Bupati Bogor pada periode 2018 hingga 2022. Pada kemenangannya sebagai Bupati Bogor diperoleh di tahun 2018 dengan pasangannya yaitu Iwan Setiawan dengan meraih suara tertinggi diantara pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya yaitu sebanyak 41,12% atau 912.221 suara (Yandwiputra, 2018). Pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati perempuan di Bogor, Ade Yasin memiliki karakteristik gaya kepemimpinannya sendiri. Ade Yasin dikenal sebagai Bupati Bogor yang memiliki gaya kepemimpinan yang fokus pada pembangunan Bogor dan kepemimpinan yang merakyat.

Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan Ade Yasin yang berorientasi terhadap rakyat dan pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan salah satunya adalah program Samisade. Pada masa jabatannya, APBD Bogor pada tahun 2021 diketahui berada di angka Rp. 8,9 triliun. Melalui APBD Bogor, Ade Yasin menciptakan Program Samisade atau Satu Miliar Satu Desa yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa-desa di Bogor serta mendorong pemberdayaan rakyat di desa-desa Bogor. Melalui program ini, Ade Yasin berhasil untuk mendorong pembangunan desa tertinggal di Bogor serta menghapus 41 dari 45 desa yang tertinggal di Bogor (Antara, 2021).

Selain melalui kebijakan yang fokus dalam pembangunan dan yang merakyat seperti program Samisade, Ade Yasin turut aktif dalam mendorong pembangunan Bogor melalui beberapa program berkelanjutan seperti adanya program *"Bogor: The City of Sport and Tourism"*. Pada program ini, Ade Yasin mendorong program yang berkelanjutan melalui pendongkrakan sektor ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan Ade Yasin adalah kepemimpinan yang visioner melalui program yang fokus dalam pembangunan dan berkelanjutan serta kepemimpinan yang populis melalui kedekatannya terhadap rakyat Bogor.

Disisi lain dari kepemimpinan yang populis dan juga visioner, Ade Yasin juga dikenal dengan kepemimpinannya yang memiliki sangkut pautan dengan dinasti politik. Hal ini dikarenakan Ade Yasin merupakan adik dari seorang mantan Bupati Bogor yaitu Rachmat Yasin. Dinasti politik yang ada di Bogor terlihat dari adanya keberlanjutan kekuasaan Rachmat Yasin, kepada adik kandungnya yaitu Ade Yasin (Susanti, F & Alva Beriansyah, 2024). Melalui dinasti politik keluarga Yasin, kepemimpinan serta kemenangan Ade Yasin tentunya juga dipengaruhi dari dinasti politik keluarganya. Selain dipuji dari kinerja kepemimpinannya yang populis serta visioner. Ade Yasin turut mendapatkan kritik atas kepemimpinannya yang dinilai melanggar dinasti politik di Bogor. Kritik terhadap Ade Yasin atas langgengnya dinasti politik di Bogor karena disaat kakaknya yaitu Rachmat Yasin terkena kasus korupsi, Ade Yasin justru hadir untuk menggantikan posisi dari kakaknya yaitu Rachmat Yasin (Fauzy, 2024). Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Ade Yasin sebagai bupati Bogor mengalami berbagai dinamika kepemimpinan.

2. Kasus Korupsi Ade Yasin

Kasus korupsi yang menimpa Bupati Bogor Ade Yasin mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 26 hingga 27 April 2022. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik suap menyuap yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK menjelaskan bahwa penangkapan tersebut bermula dari dugaan pemberian uang oleh Ade Yasin melalui orang-orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Operasi ini mengamankan sebanyak

12 orang yang diduga terlibat, termasuk empat auditor BPK dan beberapa pejabat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Para tersangka kemudian dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap (Kamil & Asril, 2022).

Rangkaian penangkapan diawali pada Selasa pagi, 26 April 2022, ketika tim penyidik KPK menuju sebuah hotel di Bogor tempat dugaan penyerahan uang terjadi. Namun setelah proses penyerahan selesai, para auditor BPK kembali ke Bandung, memaksa KPK membagi dua tim untuk segera melakukan penyergapan. Salah satu tim kemudian bergerak ke Bandung dan berhasil menangkap empat pegawai BPK yang terlibat, masing-masing di tempat tinggalnya pada malam hari. Keempat pegawai tersebut adalah Anthon Merdiansyah (Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis), Arko Mulawan (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah. Mereka kemudian langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Secara paralel, pada pagi hari Rabu, 27 April 2022, tim lain dari KPK menangkap Ade Yasin di kediamannya di Cibinong bersama sejumlah ASN Pemkab Bogor lainnya yang juga dicurigai terlibat dalam skema suap ini. Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dalam proses OTT itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai total Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta serta uang dalam rekening bank senilai Rp 454 juta. (Tempo.co, 2022)

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Pihak pemberi suap adalah Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018–2023, Maulana Adam selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah yang menjabat sebagai Kasubid Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, serta Rizki Taufik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sementara itu, pihak penerima suap adalah empat auditor BPK Perwakilan Jawa Barat, yaitu Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah. Ade Yasin, menurut keterangan KPK, diduga kuat menginstruksikan bawahannya untuk menyuap auditor BPK agar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2021. Keinginan untuk mendapatkan opini tersebut dianggap memiliki kepentingan politis dan administratif karena opini WTP sering dijadikan indikator keberhasilan tata kelola keuangan daerah oleh publik maupun internal birokrasi pemerintahan (Tempo.co, 2022).

Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa terdapat beberapa temuan signifikan dalam proses audit yang dilakukan BPK, salah satunya adalah pelaksanaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda–Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar yang tidak sesuai dengan kontrak. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kelemahan dalam pelaksanaan anggaran melalui suap kepada auditor. Ade Yasin sendiri membantah tuduhan bahwa ia memerintahkan bawahannya untuk memberikan suap. Dalam pernyataannya kepada media saat digelandang KPK, ia mengklaim bahwa tindak pidana tersebut adalah inisiatif anak buahnya semata dan menyebutnya sebagai “inisiatif membawa bencana” (IMB). Meskipun demikian, ia menyatakan siap bertanggung jawab secara moral sebagai seorang pemimpin atas tindakan bawahannya. Kuasa hukum Ade Yasin juga

mengajukan keberatan dalam sidang eksepsi dengan dalih bahwa dakwaan terhadap kliennya tidak cermat dan KPK telah menyeret nama Ade Yasin tanpa cukup bukti langsung yang menunjukkan keterlibatannya secara personal dalam transaksi suap (Wilda, 2022).

Secara hukum, KPK menjerat Ade Yasin dan tiga bawahannya sebagai pihak pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, empat pegawai BPK yang menerima suap dikenai Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan pasal tersebut menunjukkan bahwa KPK memiliki bukti kuat bahwa terjadi perbuatan pidana yang melibatkan pemberian dan penerimaan uang untuk mempengaruhi hasil audit yang seharusnya dilakukan secara independen dan profesional. Kasus ini menjadi sangat mencolok karena bukan pertama kalinya keluarga Yasin terlibat dalam pusaran korupsi di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, pada tahun 2014, Rachmat Yasin yang merupakan kakak kandung Ade Yasin juga ditangkap oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan lahan dan dihukum lima tahun penjara. Ironisnya, setelah bebas dari masa hukuman, Rachmat kembali ditangkap oleh KPK pada tahun 2019 dalam perkara gratifikasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pola berulang ini mengindikasikan adanya kultur kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan jabatan publik demi kepentingan pribadi maupun kelompok, yang pada akhirnya merusak sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Wilda, 2022).

Peristiwa OTT yang menjerat Ade Yasin juga menjadi momentum penting bagi publik untuk menilai efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal yang ada di lembaga pemerintahan daerah. Fakta bahwa pemberian uang dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu level jabatan menandakan lemahnya integritas birokrasi dalam menjaga netralitas dan akuntabilitas keuangan publik. Selain itu, keterlibatan auditor BPK sebagai pihak yang seharusnya menjadi penjaga transparansi dan pengawas independen atas penggunaan anggaran negara menambah parah bobroknya sistem pengawasan yang selama ini dipercayai publik. Kepercayaan terhadap lembaga BPK sebagai pengawal keuangan negara turut tercoreng akibat keterlibatan oknum di tubuhnya yang mau menerima suap demi memberikan opini baik atas laporan keuangan yang sejatinya bermasalah. Kasus Ade Yasin mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pencitraan administratif semu melalui manipulasi audit dengan cara menyuap auditor. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan legitimasi politik dan memperlihatkan capaian fiktif yang tidak didukung oleh kualitas pelaksanaan anggaran di lapangan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama tentu sangat dirugikan karena predikat WTP yang diperoleh secara tidak sah dapat menutupi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan, termasuk proyek-proyek yang dijalankan tidak sesuai spesifikasi atau merugikan keuangan negara. KPK dalam hal ini berperan sangat penting sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa praktik kecurangan semacam ini bisa diusut dan ditindak sesuai hukum yang berlaku (Kamil & Asril, 2022).

Dari sisi pencegahan, kasus ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem audit dan pengawasan yang lebih ketat, baik dari sisi mekanisme kerja auditor BPK maupun dari sisi transparansi dalam proses audit itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan integritas individu yang mengemban tugas pengawasan agar tidak mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi. KPK sebagai lembaga penegak hukum juga dituntut untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya agar dapat memantau potensi pelanggaran sejak dini. Dalam konteks ini, masyarakat juga harus didorong untuk lebih aktif melaporkan indikasi praktik korupsi yang terjadi di daerahnya melalui kanal pelaporan yang disediakan.

3. Penyelesaian Kasus Ade Yasin

Korupsi yang dilakukan Ade Yasin selaku mantan Bupati Bogor berakhir dengan keputusan vonis empat tahun penjara, denda 100 juta dan subsider enam bulan kurungan. Ade Yasin dinilai hakim secara sah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Terungkapnya kasus ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK bisa dinilai berperan baik dalam mengungkapkan kasus ini yang berawal dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai mantan Bupati Bogor tersebut. Masyarakat menilai ada kecurigaan dan menduga ada pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaan kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Menindaklanjuti laporan masyarakat KPK segera membagi 2 TIM untuk mengamankan Ade Yasin beserta pihak lain yang dinilai menerima uang. Mengutip dari Kompas "Kronologi Tangkap Tangan Bupati Bogor Ade Yasin, Awal Mula Suap Rp 1,9 M untuk Auditor BPK", hasil dari operasi tangkap tangan ini adalah KPK berhasil mengamankan bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah dengan total RP. 1,024 Miliar yang terdiri dari uang tunai senilai Rp. 570 juta dan jumlah pada rekening bank senilai Rp. 454 juta. Untuk membantu menyelesaikan kasus korupsi yang sangat merugikan ini jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 40 saksi yang terdiri atas pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, pengusaha dan lima saksi dari Pemkab Bogor demi menguatkan dugaan korupsi karena pada saat itu KPK belum memiliki alat bukti yang cukup.

Setelah ada putusan akhir hakim tim hukum Ade Yasin mengajukan Kasasi untuk meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan sehingga tidak ada kesalahan selama proses peradilan berlangsung. Upaya kasasi yang dilakukan memberikan dugaan bahwa KPK melakukan kriminalisasi pada Ade Yasin dan adanya unsur politik dalam penangkapan mantan Bupati tersebut. Namun, banding kasasi yang diajukan ditolak oleh mahkamah agung dan membuktikan bahwa seluruh penegakan hukum yang dilakukan KPK murni untuk memberantas praktik korupsi dan sesuai dengan prosedur hukum.

Peran KPK dalam kasus Ade Yasin ini menunjukkan perlunya keseriusan lembaga pemberantas korupsi untuk memberhentikan rantai korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga independen KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkait kasus korupsi. Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam

pemberantasan korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam menjalankan tugasnya ini KPK sering menghadapi hambatan dan tekanan dari berbagai pihak-pihak yang ingin menghalangi upaya pemberantasan korupsi, maupun dari oknum-oknum di dalam lembaganya sendiri (Putri, 2024). Menurut Putra dan Siti (2024) tantangan lain yang dihadapi adalah pihak yang terlibat seringkali memanfaatkan celah hukum untuk menghambat proses, kekurangan sumber daya, dan perlawanan dari pihak yang terbatas.

Selain adanya lembaga seperti KPK diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja para pemimpin daerah dalam mengelola anggaran daerah. Seperti kasus Ade Yasin yang berawal dari adanya dugaan dari masyarakat, sangat dibutuhkan masyarakat yang kritis dan anti korupsi. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai fakta. Adanya fakta atau bukti ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai pelapor memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk menyampaikan informasi dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

4. Dampak Korupsi Ade Yasin Terhadap Masyarakat Bogor

Adanya kasus korupsi Ade Yasin di Bogor sangat berdampak kompleks. Hal ini dikarenakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Ade Yasin berdampak terhadap segala aspek Kota Bogor terutama terhadap masyarakat. Terjadinya korupsi Ade Yasin sangat merugikan Kota Bogor. Kerugian yang didapatkan dari kasus ini adalah ruginya dana anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk mendorong pembangunan serta ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat Kota Bogor justru digunakan untuk demi kepentingan Ade Yasin. Diketahui meskipun Ade Yasin mendorong berbagai kebijakan melalui program yang berkelanjutan seperti program pembangunan infrastruktur, dalam kasus ini Ade Yasin justru menggunakan program ini untuk melancarkan aksi korupsi. Hal ini bisa dilihat bahwa melalui audit yang dilakukan oleh pihak dinas PUPR, salah satu proyek pekerjaan peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari yang digadang memiliki nilai anggaran sebesar Rp 94,6 miliar tidak berjalan sesuai dengan kontrak (Saputra, 2022). Melihat fakta ini dapat dilihat bahwa kasus korupsi Ade Yasin telah berdampak terhadap segala aspek di Bogor seperti kerugian dana anggaran daerah, lalu kasus ini juga mendorong pembangunan daerah yang terhadap akibatnya pelayanan publik dari pemerintah juga ikut serta mengalami penurunan sehingga masyarakat Bogor lah yang paling dirugikan melalui kasus ini karena korupsi Ade Yasin memiliki dampak yang domino.

Dampak kasus korupsi Ade Yasin yang telah menciptakan kerugian bagi Kota Bogor telah menciptakan dampak lain yang tercipta melalui kasus ini. Dampak lain dari kasus korupsi Ade Yasin yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Bogor. Diketahui bahwa melalui survei pada tahun 2023, sebanyak 63% masyarakat Bogor tidak memiliki kepercayaan atas kinerja pemerintah lokal Bogor (RRI, 2023). Survei tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah lokal Bogor masih belum cukup serta kuat dalam

memenuhi kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah lokalnya. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat Bogor tentunya tidak luput dari kasus Korupsi Ade Yasin. Menurunnya kepuasan masyarakat Bogor tepat terjadi setelah Ade Yasin terlibat didalam kasus korupsi (Murtadho, 2024). Melalui kasus ini, masyarakat menjadi skeptis terhadap kinerja pemerintah lokal Bogor yang dinilai sering merugikan karena seringkali terlibat kasus korupsi ditambah Ade Yasin turut terlibat di dalam dinasti politik Yasin yang juga turut merugikan Bogor melalui kasus korupsi kakaknya yaitu Rachmat Yasin. Melihat dampak ini dapat dengan jelas bahwa korupsi Ade Yasin merugikan banyak hal terutama bagi masyarakat karena masyarakat telah kehilangan haknya melalui perampasan dana anggaran sehingga masyarakat mengalami penurunan kepercayaan serta kepuasan terhadap pemerintah lokal Bogor.

5. Solusi upaya penanganan korupsi dana anggaran Kota Bogor

Korupsi dalam pengelolaan dana anggaran daerah menjadi ancaman serius bagi keberhasilan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Bogor. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penanganan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun teknologis. Salah satu langkah penting dalam menangani korupsi anggaran daerah adalah memperkuat sistem pengawasan internal. Lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah perlu diberikan keleluasaan yang lebih besar agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan objektif. Selama ini, masih ditemukan kondisi di mana pengawasan cenderung bersifat formalitas atau bahkan terhambat oleh intervensi kepentingan politik. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengawas, serta perlindungan terhadap independensi lembaga pengawas merupakan elemen penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif (Sugianto, et al. 2021).

Upaya lain yang tak kalah penting adalah penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kemajuan teknologi informasi seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam proses penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana publik (Nasrudin & Firmansyah, 2022). Penggunaan sistem e-budgeting dan e-procurement menjadi solusi konkret untuk mengurangi celah-celah korupsi. Melalui sistem digital, seluruh proses keuangan pemerintah dapat ditelusuri dan diaudit dengan lebih akurat, serta memungkinkan masyarakat untuk turut mengawasi secara langsung. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi di daerah. Masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pengelolaan keuangan daerah akan lebih kritis dan berani dalam menyuarakan penyimpangan yang terjadi (Nasrudin & Firmansyah, 2022). Oleh karena itu, pendidikan politik dan literasi anggaran perlu ditingkatkan agar warga Kota Bogor dapat lebih aktif terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta mampu memanfaatkan mekanisme pengaduan publik untuk melaporkan dugaan korupsi.

Di sisi lain, reformasi birokrasi harus dilakukan secara serius. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan anggaran harus memiliki integritas yang tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, pembinaan nilai-nilai integritas, serta penerapan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. ASN yang profesional dan berintegritas akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel (Apriastianti & Widjantie, 2022). Penegakan hukum juga harus menjadi perhatian utama dalam penanganan korupsi anggaran. Penindakan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi diproses secara transparan dan adil. Di samping itu, pengawasan terhadap ketaatan terhadap regulasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek dan pengadaan barang dan jasa, harus diperketat (Nurvada & Novita, 2021).

Untuk mendukung upaya jangka panjang, pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sangat penting dalam membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Dengan generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi, diharapkan Kota Bogor ke depan dapat memiliki sistem pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya. Semua solusi tersebut tentu saja memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Penanganan korupsi tidak bisa hanya diserahkan pada satu lembaga, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, lembaga pengawas, penegak hukum, masyarakat sipil, media, dan dunia pendidikan harus bersinergi dalam membangun sistem yang mencegah dan menindak korupsi secara menyeluruh. Jika kolaborasi ini dapat dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Kota Bogor akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun tata kelola anggaran yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.

6. Evaluasi Kasus

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, merupakan preseden serius dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah. Penyalahgunaan dana anggaran yang dilakukan melalui praktik suap terhadap auditor BPK untuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap partisipasi masyarakat. Ketika publik menyaksikan adanya manipulasi dalam proses anggaran dan lemahnya integritas pejabat, maka kepercayaan terhadap pemerintah lokal akan menurun secara signifikan. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan terlibat dalam forum-forum partisipatif seperti Musrenbang dan pengawasan anggaran.

Evaluasi menunjukkan bahwa penyebab utama lemahnya partisipasi masyarakat adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, literasi publik terhadap proses pengelolaan anggaran masih minim, sehingga ruang

partisipasi yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian oleh Maulana (2023) menegaskan bahwa rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa menjadi pintu masuk praktik korupsi yang akhirnya mengurangi kepercayaan publik (Maulana, 2023). Sebagai bentuk rekomendasi, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem transparansi dengan memanfaatkan teknologi seperti e-budgeting yang memungkinkan akses publik terhadap proses penganggaran secara real time.

Selain itu, pendidikan literasi anggaran di tingkat desa dan kelurahan harus digalakkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan anggaran. Risnaningsih et al. (2022) menyatakan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami anggaran menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan dana publik (Risnaningsih, et al. 2022). Selanjutnya, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program populis seperti Samisade yang rawan disusupi kepentingan politik. Reformasi birokrasi, penguatan inspektorat daerah, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan proyek-proyek publik harus menjadi prioritas dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan dana anggaran dalam kasus korupsi Ade Yasin memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah. Terungkapnya praktik suap yang dilakukan terhadap auditor BPK memperkuat persepsi negatif bahwa birokrasi daerah rentan terhadap korupsi yang sistemik, terutama ketika pejabat publik memanipulasi proses audit demi menjaga nama baik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah menurun yang kemudian berdampak pada melemahnya partisipasi publik dalam kegiatan pengawasan maupun pelibatan dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas saluran-saluran pengawasan yang ada seperti forum musyawarah karena merasa bahwa pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dibanding dengan elite. Disisi lain, kasus ini juga menyadarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi terutama mengenai dana daerah. Oleh karena itu, diperlukan dorongan partisipasi publik, reformasi tata kelola pemerintahan daerah, transparansi dan akuntabilitas demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K., Karim, Z. P., Fadlullah, N., & Armia, M. S. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101-120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Andriani, N.M. Ayu. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46): 1-1
- Antara. (2021, Juni 2). Samisade Jadi Andalan Bupati Bogor Ade Yasin Hapus 4 Desa Tertinggal Ini. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/arsip/-samisade-jadi-andalan-bupati-bogor-ade-yasin-hapus-4-desa-tertinggal-ini--507958>
- APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(4).

- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh temuan audit terhadap tingkat Artikel. 2000. Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Asril, S. (2022, April 27). Kronologi Tangkap Tangan Bupati Bogor Ade Yasin, Awal Mula Suap Rp 1,9 M untuk Auditor BPK. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/04113891/kronologi-tangkap-tangan-bupati-bogor-ade-yasin-awal-mula-suap-rp-19-m-untuk>
- Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 163–170.
- Fauzy, N. (2024, Maret 22). Perjalanan Dinasti Politik Yasin di Bogor, Berkuasa Bertahun-tahun, Kini Runtuh di Pemilu 2024. *tribunnews.com*. <https://bogor.tribunnews.com/2024/03/22/perjalanan-dinasti-politik-yasin-di-bogor-berkuasa-bertahun-tahun-kini-runtuh-di-pemilu-2024>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 609-618. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>
- Internal pada pemerintah daerah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan
- Kamil, I., & Asril, S. (2022, April 28). Kronologi tangkap tangan Bupati Bogor Ade Yasin, awal mula suap Rp 1,9 m untuk auditor BPK. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/04113891/kronologi-tangkap-tangan-bupati-bogor-ade-yasin-awal-mula-suap-rp-19-m-untuk>
- Kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah? *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2).
- korupsi pemerintah daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(02).
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
- Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214-231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *ARMADA: Jurnal*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE.
- Murtadho, M. A. (2024, Januari 12). Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Dinilai Anjlok. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/arsip/tingkat-kepuasan-terhadap-kinerja-pemerintah-kabupaten-bogor-dinilai-anjlok-98555>
- Murtadho, M. A., & Dewi, C. M. T. (2023, March 10). Kasasi Ade Yasin Ditolak, KPK Sebut Bukti Bukan Kriminalisasi dan Politis. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/kasasi-ade-yasin-ditolak-kpk-sebut-bukti-bukan-kriminalisasi-dan-politis-210502>

- Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2022). Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan
- Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2022). Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2021). Bagaimanakah opini audit, temuan audit atas
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2021). Bagaimanakah opini audit, temuan audit atas
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>
- Pemerintah daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 153–161.
- Penelitian Multidisiplin, 1(3), 214–231.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Rahimallah, M. T. A. (2022). Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif).
- Risnaningsih, R., Mukofi, A., & Hendrani, F. (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 163-170. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7139>
- Saputra, E. Y. (2022, April 28). KPK Jelaskan Kronologi OTT Ade Yasin yang Diduga Suap Pegawai BPK. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-jelaskan-kronologi-ott-ade-yasin-yang-diduga-suap-pegawai-bpk-363167>
- Sugianto, B., Khairo, F., & Abbas, Z. (2021). Peran Inspektorat dalam pengawasan
- Survei : 63% Warga Tidak Puas Kinerja Pemkot Bogor*. (2023, Oktober 19). RRI.co.id. Retrieved Juni 1, 2025, from <https://www.rri.co.id/daerah/407504/survei-63-warga-tidak-puas-kinerja-pemkot-bogor>
- Susanti, F & Alva Beriansyah. (2024). Indonesia ANALISIS POLA TERBENTUKNYA DINASTI POLITK DESA NYOGAN KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 8(2), 138-148. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v8i2.37557>
- Tempo.co. (2022, April 28). KPK jelaskan kronologi OTT Ade Yasin yang diduga suap pegawai BPK. *Tempo*. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/kpk-jelaskan-kronologi-ott-ade-yasin-yang-diduga-suap-pegawai-bpk-363167>
- Wijayanto, H. (2015). TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING (Dalam perspektif teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79>
- Wilda, H. N. (2022, April 28). Kronologi OTT Bupati Bogor Ade Yasin terkait kasus suap. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6054799/kronologi-ott-bupati-bogor-ade-yasin-terkait-kasus-suap?single=1>

Yandwiputra, A. R. (2018, Juli 8). Pilkada Kabupaten Bogor, Ade Yasin - Iwan Setiawan Menang. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/arsip/pilkada-kabupaten-bogor-ade-yasin-iwan-setiawan-menang-897433>